

“ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN AKTA PERUBAHAN PERSEROAN TERBATAS YANG DIBUAT OLEH NOTARIS NAMUN TIDAK MENDAPAT PERSETUJUAN MENTERI HUKUM DAN HAM”

BINSAR WIJAYA

ABSTRACT

Articles of Amendment of a corporation are one of the important parts in a corporation because it contains the right and obligation which are obviously stipulated in the Agenda. Articles of amendment of statutes is the ones which guarantee legal certainty for stakeholders in it, but the problems arouse when it is stipulated in Article 21, paragraph 1 of Law No. 40/2007 on Corporation, it is not filed or requested: whether Articles of Amendment of statutes does not get approval from the Minister of Law and Human Resources as it is required in Article 21, paragraph 1 on the requirement to get the approval from the Minister will be cancelled by law or whether it becomes invalid because it does not get approval from the Minister, or whether it is cancelled by itself because it has passed the time limit for requesting to get approval from the Minister.

Keywords: Position of Certificate, Articles of Amendment, Articles of Amendment which does not get Approval from the Minister of Law and Human Resources

I. PENDAHULUAN

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menetapkan bahwa, perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri, dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam Bahasa Indonesia, ketentuan tersebut menekankan bahwa keharusan untuk memperoleh persetujuan Menteri, serta pasal-pasal lainnya juga menekankan batas waktu yang diberikan dalam permohonan untuk memperoleh persetujuan Menteri (tentang perubahan anggaran dasar), haruslah diajukan sebelum lewat dari waktu yang ditentukan, dan akta notaris yang dibuat merupakan penentu dari diterima atau tidaknya permohonan persetujuan Menteri tersebut, apabila akta notaris itu dibuat lewat dari waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ini, yakni lewat dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal akta notaris yang memuat anggaran dasar ini dibuat maka permohonan untuk mendapat persetujuan Menteri tidak dapat diajukan atau disampaikan kepada

Menteri, hal ini jelas menyatakan bahwa permohonan untuk mendapat persetujuan Menteri tidak dapat diterima setelah lewat dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal akta notaris yang memuat anggaran dasar ini dibuat.

Hal tersebut menimbulkan tanda tanya, bahwa setelah lewatnya batas waktu yang telah ditentukan yakni lewat dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal akta notaris yang memuat anggaran dasar itu dibuat notaris, dan perseroan terbatas tersebut tidak memohonkan perubahan anggaran dasarnya kepada Menteri Hukum dan HAM sehingga tidak mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan HAM, maka bagaimanakah kedudukan akta perubahan yang dibuat oleh notaris tersebut, apakah batal demi hukum atau akta perubahan perseroan terbatas yang dibuat oleh notaris tersebut dapat dengan sendirinya batal demi hukum setelah lewatnya batas waktu permohonan untuk memperoleh persetujuan Menteri, atau Akta tersebut menjadi tidak berlaku karena tidak memiliki persetujuan Menteri.

Dinamika permasalahan tersebut tidak hanya sampai disana namun berlanjut, ketika hak dan tanggung jawab dipertanyakan, dan polemik tersebut juga berkembang dikarenakan tidak adanya aturan dan sanksi yang tegas dan keras, yang apabila perseroan terbatas tersebut tidak mengajukan permohonan persetujuan Menteri terhadap perubahan anggaran dasarnya, perseroan tersebut dapat dihukum dan diberikan sanksi-sanksi, sayangnya sanksi dan hukuman tersebut tidak ditemukan di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ini, dan ketiadaan sanksi dan hukuman bagi perseroan terbatas yang tidak memohonkan terhadap perubahan anggaran dasarnya juga menjadi pemicu dari kealpaan atau kelalaian yang ditimbulkan perseroan terbatas, hal tersebut menjadi pertimbangan di satu sisi ada aturan hukum yang mengharuskan perubahan anggaran dasar memperoleh persetujuan Menteri dan dipertegas dengan batas waktu yang diberikan dan disisi lain pula tiadanya kewajiban untuk memohonkan permohonan perubahan anggaran dasar serta kewajiban mendapat persetujuan Menteri, dan disisi yang lain pula tiada sanksi dan hukuman yang berlaku apabila perseroan terbatas tersebut tidak memenuhi keharusan seperti yang tertuang di dalam pasal 21 ayat (1) sampai dengan ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tersebut.

Hal tersebut menimbulkan kerancuan dan kebimbangan, sehingga diperlukan kepastian hukum untuk menjelaskan, khususnya tentang sah atau tidaknya Akta yang dibuat oleh Notaris namun tidak dimohonkan perubahan akta tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM sehingga Akta tersebut tidak mendapat persetujuan Menteri Hukum dan HAM, lalu bagaimanakah status Akta yang dibuat oleh notaris tersebut apakah batal demi hukum apabila tidak dimohonkan sehingga tidak mendapat persetujuan Menteri atau batal dengan sendirinya apabila akta tersebut lewat dari batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang, atau akta tersebut menjadi tidak berlaku apabila tidak dimohonkan kepada Menteri Hukum dan HAM.

Berdasarkan uraian-uraian yang tersebut diatas, maka dilakukan penelitian dengan judul:

“ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN AKTA PERUBAHAN PERSEROAN TERBATAS YANG DIBUAT OLEH NOTARIS NAMUN TIDAK MENDAPAT PERSETUJUAN MENTERI HUKUM DAN HAM”

Perumusan Masalah dalam penelitian ini adalah

1. Faktor apa saja yang menyebabkan akta perubahan perseroan terbatas tidak diajukan permohonannya kepada Menteri Hukum dan HAM?
2. Bagaimanakah kedudukan hukum akta perubahan perseroan terbatas yang tidak diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM sehingga tidak memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan HAM?
3. Upaya Hukum apa yang dapat di tempuh oleh pemegang saham atau perseroan terbatas di dalam perseroan terbatas yang tidak memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan HAM?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dengan Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum berupa peraturan-peraturan yang terdiri dari :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.
 4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tanggal 25 Maret 2014, Berita Negara Nomor 329,2014, Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan lebih lanjut tentang bahan hukum primer. Bahan-bahan yang sangat erat hubungannya dengan bahan hukum primer agar dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti buku-buku ilmiah para sarjana, tesis atau hasil-hasil penelitian lainnya, artikel-artikel.
- c. Bahan hukum tertier yaitu, bahan hukum yang didapat untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu seperti kamus hukum.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Akta Perubahan Perseroan Terbatas Tidak Diajukan Permohonannya Kepada Menteri Hukum dan HAM

a. Faktor Kelalaian Manusia

Tidak dipenuhi ketentuan pasal 21 UUPT, yakni keharusan untuk mendapat persetujuan Menteri terhadap perubahan anggaran dasar perseroan terbatas, bisa disebabkan beberapa faktor penyebab, salah satu penyebab yang paling besar adalah di karenakan faktor kelalaian manusia itu sendiri. Kelalaian Badan hukum, dapat di analogikan sebagai kelalaian para pengurusnya, akta perubahan anggaran dasar yang tidak memiliki persetujuan Menteri Hukum dan HAM merupakan kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh direksi perseroan

terbatas. Oleh karena itu sangat penting untuk mengontrol perilaku dari para Direktur yang mempunyai posisi dan kekuasaan besar dalam mengelola perusahaan, termasuk menentukan standar perilaku (*standart of conduct*) untuk melindungi pihak-pihak yang akan dirugikan apabila direktur berperilaku tidak sesuai dengan kewenangannya atau perilaku tidak jujur.¹

UUPT memberikan kewenangan kepada direksi untuk menjalankan kepengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, sesuai dengan Pasal 92 Ayat (1) UUPT, dengan adanya kepastian hukum ini, direksi memiliki peran yang besar terhadap tidak diperolehnya persetujuan Menteri Hukum dan HAM terhadap akta perubahan anggaran dasar tersebut. Sehingga direksilah yang dapat dipersalahkan jika dikemudian hari terjadi berbagai konflik atau permasalahan yang dapat terjadi dikarenakan tidak diperolehnya persetujuan Menteri Hukum dan HAM terhadap akta perubahan perseroan terbatas.

Berikut ini merupakan hal-hal yang dapat menyebabkan akta perubahan perseroan terbatas itu tidak memperoleh persetujuan Menteri:

1. Kesengajaan Direksi Perseroan Terbatas Tidak Mengajukan Permohonan.²

Menurut notaris Farida Hanum, penyebab perseroan terbatas itu tidak memiliki persetujuan Menteri, adalah karena perseroan terbatas atau pengurus perseroan terbatas itu tidak mau meneruskan sampai ke persetujuan Menterinya. Hal ini menunjukkan bahwa pengurus perseroan tersebut secara nyata sengaja tidak mau mengurus hingga sampai ke persetujuan Menterinya.

2. Karena Biaya Pengajuan Permohonan.³

Faktor biaya juga menjadi alasan akta perubahan anggaran dasar tidak di mohonkan direksi untuk memperoleh persetujuan Menteri. Karena permohonan pengajuan perubahan anggaran dasar untuk mendapat persetujuan Menteri itu biayanya tidak murah⁴. Dan jika akta tersebut tidak memiliki persetujuan Menteri,

¹ Gunawan Wijaya, *Resiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris dan Pemilik PT*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hlm. 41.

² Wawancara dengan Notaris Farida Hanum, Notaris Kotamadya Medan.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

bukan Notarisnya yang salah, karena bisa saja PT itu tidak membayar paket untuk mengurus permohonan persetujuannya⁵. Faktor biaya dapat berpengaruh terhadap akta perubahan perseroan terbatas itu tidak memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan HAM, dikarenakan direksi menganggap akta perubahan yang dibuat oleh notaris sudah cukup, sehingga tidak mau mengeluarkan biaya yang lain untuk memperoleh persetujuan Menterinya.⁶

3. Kurangnya Advice, Saran dan Arahan Langsung dari Notaris.⁷

Kurangnya *advice*, saran, dan arahan langsung notaris kepada pengurus perseroan (direksi) juga dapat mempengaruhi akta perubahan anggaran dasar itu tidak memiliki persetujuan Menteri.⁸

4. Hal-hal yang di luar Prediksi Perseroan Terbatas, Misalnya Notaris yang mengurus Persetujuan di Penjara karena TIPIRING (Tindak Pidana Ringan).

Notaris memiliki peran yang penting di dalam perseroan terbatas, karena notarislah pejabat yang dapat menjamin kepastian hukum terhadap akta yang dibuatnya, notaris jugalah yang dapat memohonkan persetujuan Menteri terhadap akta perubahan yang terjadi di dalam perseroan terbatas. Karena hanya notaris yang dapat mengakses sistem administrasi badan hukum (SABH) untuk memperoleh persetujuan Menteri terhadap akta perubahan perseroan terbatas tersebut. Sehingga notaris juga turut andil dalam memberikan kontribusi dalam hal perseroan terbatas memperoleh persetujuan Menteri. Sehingga apabila notaris yang mengurus persetujuan Menteri terjerat dengan kasus hukum, seperti dipenjaranya notaris karena TIPIRING ada Tindak pidana umum lainnya dapat berakibat buruk pula terhadap permohonan-permohonan yang telah dimohonkan para pihak kepada notaris. Karena notaris merupakan pejabat yang dapat melegalkan perjanjian, sehingga tidak dimungkinkan notaris dapat terjerat dengan kasus yang ada, seperti belakangan ini banyak notaris yang diperiksa oleh penyidik dan ditetapkan tersangka (turut serta) oleh penyidik.

b. Karena Kelemahan Undang-Undang.

⁵ Wawancara dengan Notaris Syahril Sofyan, Notaris Kotamadya Medan.

⁶ Wawancara dengan Notaris Aslely Asrol, Notaris Kotamadya Medan.

⁷ Wawancara dengan Notaris Farida Hanum, *Op.cit.*

⁸ *Ibid.*

1. Tidak Adanya Sanksi dan Hukuman Yang Tegas Terhadap Permohonan untuk Mendapat Persetujuan Menteri.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, memang secara tegas tidak mencatumkan sanksi terhadap pengajuan permohonan untuk memperoleh persetujuan Menteri, hal inilah yang dapat menyebabkan subjek hukum tidak taat hukum. Menurut S.M. Amin, hukum merupakan kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum adalah untuk mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.⁹ Dan menurut CST. Kansil, ciri-ciri dari hukum adalah adanya perintah dan/atau larangan, dan perintah dan/atau larangan itu harus patuh ditaati oleh setiap orang, dan barangsiapa yang dengan sengaja melanggar sesuatu kedah hukum akan dikenakan sanksi (sebagai akibat pelanggaran kedah hukum) yang berupa hukuman. Dari dua pendapat tersebut, peraturan hukum haruslah memiliki sanksi, sehingga dengan sanksilah subjek hukum akan taat hukum.

B. Kedudukan Akta Yang Tidak Di Mohonkan Sehingga Tidak Memiliki Persetujuan Menteri Hukum dan HAM.

Dapatkah Akta perubahan anggaran dasar batal demi hukum, batal dengan sendirinya karena lewat dari batas waktu permohonan persetujuan Menteri, atau menjadi tidak berlaku karena tidak memiliki persetujuan Menteri?

Perseroan terbatas lahir sebagai badan hukum diawali dengan proses pendiriannya, perseroan terbatas lahir sebagai badan hukum dilatarbelakangi dengan perjanjian yang terjadi antara pelaku usaha atau pebisnis dengan pelaku usaha atau pebisnis lainnya, dengan perjanjian tersebut para pelaku usaha bersama-sama dan bersepakat untuk mengadakan kerja sama, ada yang sebagai pemodal (*Investor*), ada yang sebagai pengurus atau pengelola dan ada yang sebagai pengawas kinerja, sehingga para pelaku usaha tersebut bersama-sama membuat perjanjian untuk mendirikan badan usaha yang berbadan hukum, sehingga kerja sama tersebut dapat terlaksana dengan baik, serta keberadaan

⁹ CST. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 38.

perjanjian tersebut diakui dan dilindungi negara, yakni dengan adanya ketentuan hukum yang secara jelas mengatur hal tersebut.

Pasal 1 angka 1 UUPT dengan tegas mengatakan bahwa PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, ketentuan ini berimplikasi bahwa pendirian PT harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum perjanjian, jadi dalam pendirian PT selain tunduk kepada UUPT tunduk pula kepada hukum perjanjian.¹⁰ Perjanjian di dalam akta pendirian merupakan perjanjian awal yang mengikat para pihak, yang mengatur keharusan yang harus dibuat/dilakukan atau tidak dibuat/tidak dilakukan, karena di dalamnya terdapat subjek-subjek hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, sehingga untuk merubah akta pendirian (merubah perjanjian awal) harus adanya persetujuan dari para pihak yang terkait dalam perjanjian awal tersebut. akta pendirian tersebut merupakan bukti dari adanya kepastian hukum, terhadap hak-hak dan kewajiban para pihak yang berada didalamnya.

Akta perubahan perseroan merupakan wujud dari adanya perubahan terhadap akta pendirian atau akta-akta yang sebelumnya, baik akta pendirian maupun akta perubahan perseroan terbatas merupakan akta yang memiliki kekuatan sebagai bagai autentik, karena akta tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang yang ditunjuk langsung oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yakni notaris.

Akta perubahan anggaran dasar, yang dimuat dalam akta berita acara rapat, merupakan bukti dari adanya keputusan rapat umum pemegang saham, yang semuanya merupakan bukti adanya keputusan atau persetujuan bersama mengenai adanya sebuah perjanjian baru, yang mengikat, karena adanya kesepakatan dan syarat yang telah ditentukan atau yang telah diperjanjikan dalam mengambil keputusan RUPS yang semuanya dimuat di dalam anggaran dasar, adanya kesepakatan dalam keputusan rapat tersebut maka perjanjian lama yang telah ada, atas kesepakatan tersebut dapat berubah, mengingat bahwa perseroan terbatas didirikan berdasarkan perjanjian, dan perjanjian mengikat dan merupakan undang-

¹⁰ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009), hlm. 24.

undang bagi para pihak yang mengikatkan dirinya. Dengan begitu, akta perubahan anggaran dasar (berita acara rapat) juga merupakan janji-janji tertulis yang di tuangkan dalam akta dengan memenuhi segala ketentuan hukum, khususnya mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, dan sebagai bukti adanya perbuatan hukum yang terjadi. akta tersebut memiliki sifat sebagai akta autentik, karena akta notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh dan atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris.¹¹

Kedudukan akta perubahan anggaran dasar yang tidak diajukan permohonan persetujuannya kepada Menteri, masih memiliki kedudukan sebagai akta autentik, akta autentik menjamin adanya kepastian hukum, menjamin perlindungan terhadap hak dan kewajiban para subjek hukum, dengan demikian perikatan yang dilahirkan dengan perjanjian yang dimuat dalam akta autentik itu masih berlaku, dan tidak batal oleh karena tidak dimilikinya persetujuan Menteri terhadap akta tersebut, dan juga akta tersebut tidak dapat batal oleh karena tidak diajukan permohonan untuk mendapat persetujuan Menteri Hukum dan HAM. Batalnya suatu akta autentik hanya disebabkan oleh dua hal, yang pertama, akta tersebut dibatalkan oleh pihak-pihak yang membuatnya, dan yang kedua dibatalkan oleh putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, karena terdapat kecacatan di dalam akta tersebut, baik cacat dari pejabat pembuatnya maupun cacat karena tidak dipenuhinya syarat sahnya suatu perjanjian.

Sehingga akta perubahan yang tidak memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan HAM, masih merupakan akta autentik yang menjamin adanya kepastian hukum, dan akta perubahan tersebut merupakan bentuk dari adanya suatu perjanjian, perjanjian merupakan Undang-Undang bagi mereka yang mengikatkan diri dalam perjanjian. Meskipun legalitas persetujuan Menteri telah diabaikan, atau tidak dipenuhi, jika terjadi sengketa atau konflik atau permasalahan dikemudian hari dikarenakan tidak dimiliki persetujuan Menteri terhadap akta perubahan perseroan terbatas tersebut, maka akta perubahan

¹¹ Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, *Op.cit.*, Pasal 1 Ayat (7).

merupakan akta autentik yang menjamin adanya kepastian hukum terhadap hak-hak dan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian.

1.1. Pemegang Saham Membentuk RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) Untuk Meminta Pertanggungjawaban Direksi.

Dalam menghadapi permasalahan yang muncul dalam pengelolaan perseroan terbatas yang dilakukan oleh para pengurus maupun dewan pengawas (dewan komisaris), RUPS (Rapat umum pemegang saham) merupakan wadah yang paling tepat untuk meminta pertanggungjawabannya. Di dalam RUPS para pemegang saham yang memiliki hak suara dapat mempertanyakan, meminta penjelasan, dan pertanggungjawaban para pengurus perseroan, dan dalam RUPS juga para pengurus perseroan terbatas dapat memberikan penjelasan, dan membuktikan dirinya bersalah atau tidak bersalahnya dalam tindakannya mengurus perseroan terbatas.

Menurut pasal 97 ayat (3) UUPT juga jelas menyatakan bahwa, setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) (direksi bertanggung jawab atas pengelolaan perseroan).¹²

1.2. RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) Dapat Memberhentikan, dan Menuntut direksi secara perdata maupun pidana atas tindakan Direksi Yang Mengakibatkan Kerugian Terhadap Perseroan Terbatas.

Melalui mekanisme RUPS, pemegang saham dapat menentukan nasib direksi yang tidak profesional, atau nasib direksi yang lalai, anggota direksi dapat diberhentikan kapanpun jika terbukti telah lalai atau telah salah¹³, tetapi RUPS tidak serta merta mengeluarkan keputusan pemberhentian direksi, RUPS memberikan kesempatan kepada direksi untuk membela diri¹⁴, pembelaan diri tersebut hendaklah dilakukan dengan di dasarkan bukti-bukti sehingga para pemegang saham dapat meyakini bahwa kesalahan tersebut bukan karena

¹² *Ibid.*, Pasal 97 Ayat (3).

¹³ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, *Op.cit.*, Pasal 105 Ayat (1)

¹⁴ *Ibid.*, Pasal 105 ayat (2).

salahnya atau bukan karena kelalaiannya, tetapi jika direksi tidak dapat meyakini para pemegang saham, bahwa kesalahan itu bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, maka para pemegang saham dapat mengambil keputusan untuk memberhentikan direksi, dan pemberhentian anggota direksi berlaku sejak:¹⁵

- a. Ditutupnya RUPS, atau
- b. Tanggal keputusan atas pemberhentian RUPS, atau
- c. Tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS

Pemegang saham juga dapat memenjarakan direksi yang beritikad buruk, yang memberikan keterangan palsu, memberikan laporan keuangan palsu atau tidak benar dan/atau menyesatkan¹⁶, dan adanya dugaan direksi telah melakukan pengelapan terhadap harta kekayaan perseroan, dengan mekanisme pemegang saham baik bersama-sama atau melalui kuasanya yang mewakili nama perseroan, dapat menuntut secara pidana dengan cara membuat laporan kepolisian. Adanya kesalahan dari si pembuat, bila perbuatan melanggar hukum sebagai sebab yang menimbulkan akibat kerugian itu sudah ada, barulah kita menginjak pada hal pertanggung jawab si pembuat, karena tidak ada perbuatan melanggar hukum tanpa adanya perbuatannya ini berhubungan dengan subjek itu, sampai pada unsur kesalahan dari pihak pembuat perbuatan melanggar hukum.¹⁷

Pemegang saham dapat mengajukan gugatan perdata, untuk meminta ganti rugi kepada direksi yang lalai, baik atas nama pemegang saham yang merasa dirugikan dan/atau atas nama perseroan yang dirugikan, pengajuan gugatan ini bisa langsung dilakukan oleh pemegang saham, atau menunjuk dewan komisaris, ataupun orang lain yang ditunjuk berdasarkan RUPS.

Pemegang saham juga dapat memberhentikan direksi tanpa melalui RUPS (rapat umum pemegang saham) dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang

¹⁵ *Ibid.*, Ayat (5).

¹⁶ Lihat Pasal 69 Ayat (3), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Yakni: dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan anggota direksi dan anggota dewan komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.

¹⁷ R. Wirjono, Prodjodikoro, *Op.cit.*, hlm. 28.

bersangkutan¹⁸, dan diberi tahu terlebih dahulu kepada direksi yang bersangkutan tentang rencana pemberhentiannya, serta diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambilnya keputusan pemberhentiannya.¹⁹

B. Upaya Hukum di Notaris.

1. Membatalkan Akta Yang Tidak dapat Dimohonkan Kemudian Membuat Akta Perubahan Yang Baru.

Salah satu cara agar perseroan terbatas yang tidak memiliki persetujuan Menteri, ingin mendapatkan persetujuan Menteri adalah dengan cara membatalkan akta perubahan yang lama, hal ini adalah salah satu cara yang dapat di tempuh, apabila ada satu atau beberapa pemegang saham yang merasa kecewa dengan kinerja perseroan terbatas, dan ingin keluar dari perseroan terbatas, yang tidak profesional, pemegang saham tersebut dapat menjual kembali saham yang dimilikinya, apabila pemegang saham itu tidak ingin mempermasalahkan cara kerja pengurus perseroan terbatas yang lalai, pembatalan akta sebelumnya wajib dilakukan, agar kekuatan akta tersebut tidak mengikat lagi, dan tidak memiliki kekuatan hukum, pembatalan akta perubahan anggaran dasar yang tidak memiliki persetujuan Menteri, harus melalui mekanisme RUPS, sama seperti dengan RUPS yang sebelumnya, yang membedakan hanya agenda dalam RUPS tersebut.

Pembatalan akta perubahan anggaran yang tidak memiliki persetujuan Menteri, tanpa mekanisme RUPS, adalah tidak sah, dikarenakan akta sebelumnya memiliki kekuatan hukum, dan mengikat bagi para pihak, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya²⁰, sehingga untuk membatalkannya harus dengan kesepakatan bersama, tidak bisa dibatalkan oleh salah satu pihak.

Jadi, terhadap pemegang saham yang kecewa akan kinerja perseroan terbatas, dan ingin keluar dari perseroan terbatas, dapat menjual sahamnya kepada perseroan terbatas, dan perseroan terbatas dapat membeli kembali saham tersebut (lihat Pasal 37 UUPA), pembelian kembali harus melalui RUPS dan harus mendapat persetujuan RUPS, apabila RUPS memberikan persetujuan untuk

¹⁸ *Ibid.*, Pasal 91.

¹⁹ *Ibid.*, Pasal 105 ayat (3).

²⁰ R. Subekti & Tjitrosudibio, *Op.cit.*, hlm. 342, Pasal 1338.

membeli kembali saham tersebut, pembelian kembali atas saham tersebut dilakukan dengan akta pemindahan hak, dan salinannya di berikan kepada perseroan, dan direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus.²¹

Pembatalan akta harus melalui RUPS, pembelian kembali atas saham juga harus melalui RUPS, dan Membuat perubahan anggaran dasar menggantikan akta yang sebelumnya, yang tidak mendapat persetujuan Menteri juga harus melalui mekanisme RUPS, namun terhadap ketiga hal ini dapat dilakukan RUPS yang sama dengan mencantumkan tiga agenda (tiga mata acara) pemanggilan RUPS, ataupun di mungkinkan juga terjadi penambahan mata acara, dengan ketentuan semua pemegang saham hadir, dan menyetujui penambahan mata acara rapat. (lihat pasal 75 Ayat (3) UUPT)

Pembatalan akta, pembelian kembali atas saham, dan perubahan anggaran dasar yang baru, dapat dituangkan dalam 3 (tiga) akta yang terpisah, dapat juga dibuat 2 (dua) akta, yakni akta pembatalan dan akta perubahan anggaran dasar yang baru yang memuat juga perubahan susunan pemegang saham, dikarenakan ada jual-beli saham, serta dapat juga di tuangkan dalam 1 (satu) akta, yakni akta perubahan anggaran dasar yang baru, yang memuat tentang kebatalan akta yang sebelumnya, dan perubahan pemegang saham. Dimuat dalam beberapa akta, hal tersebut tergantung kepada keperluan, dan tergantung kepada kepentingan.

Setelah perubahan anggaran dasar itu telah dimuat dalam akta maka pengajuan permohonan perubahan anggaran dasar dapat di mohonkan kembali, tata cara permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar seperti yang tersebut di dalam Bab II.

2. Membuat Akta Pengukuhan atau Akta Penegasan Terhadap Akta Yang Tidak Dapat Di Mohonkan.

Salah satu cara agar akta perubahan yang tidak memiliki persetujuan Menteri memperoleh persetujuan Menteri adalah dengan cara membuat akta baru, yakni akta pengukuhan atau akta penegasan terhadap akta yang sebelumnya, namun demikian juga, perlu di adakannya lagi mekanisme rapat umum pemegang

²¹ Lihat pasal 56, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

saham (RUPS) ulang, dengan rapat umum pemegang saham ulang ini, maka akta pengukuhan atau akta penegasan dapat dibuat. Akta penegasan atau akta pengukuhan ini dapat dibuat, apabila di dalam akta perubahan anggaran dasar itu tidak mengalami perubahan, akta tersebut masih sama bunyi dan isinya dengan akta perubahan yang tidak memiliki persetujuan Menteri²².

Jadi, untuk membuat akta penegasan atau akta pengukuhan, perlu diadakan lagi rapat umum pemegang saham (RUPS), mekanisme RUPS (rapat umum pemegang saham) sama dengan mekanisme RUPS yang lain, tujuan diadakannya RUPS ulang adalah agar dikeluarkannya keputusan yang disepakati dalam RUPS, untuk membuat akta pengukuhan atau akta penegasan tersebut, sehingga akta penegasan atau pengukuhan atas akta perubahan yang sebelumnya, dapat di muat di dalam akta notaris, akta pengukuhan atau akta penegasan tersebut harus memuat keterangan bahwa telah dibuat akta perubahan sebelumnya, dan memuat alasan dibuat ulangnya akta tersebut.

Sehingga akta pengukuhan atau akta penegasan terhadap akta perubahan anggaran dasar yang sebelumnya yang pernah dibuat, dapat diajukan dan dimohonkan kembali kepada Menteri, dengan ketentuan permohonan yang sama, dengan permohonan perubahan anggaran dasar untuk mendapat persetujuan Menteri.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang ada disebutkan diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut, yakni:

1. Faktor penyebab akta perubahan perseroan terbatas tidak diajukan permohonannya kepada Menteri Hukum dan HAM disebabkan oleh 2 (dua) faktor yang dominan yang pertama, faktor kelalaian manusia (Direksi selaku pengurus perseroan terbatas, bisa karena kesengajaan, karena biaya, kurangnya advice dan saran dari notaris, ataupun hal-hal yang diluar prediksi perseroan terbatas, yakni notaris yang mengurus perizinan dipenjara karena tindak pidana

²² Wawancara dengan Notaris Farida Hanum, Notaris Kotamadya Medan.

ringen), dan yang kedua, adalah faktor kelemahan yang ada di undang-undang (tidak adanya sanksi dan hukuman yang tegas terhadap permohonan untuk mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan HAM).

2. Kedudukan akta perubahan perseroan terbatas yang tidak memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan HAM, adalah sebagai akta autentik, yang tidak dapat batal dengan sendirinya, karena tidak memiliki Persetujuan Menteri, tidak juga batal dengan sendirinya karena telah melewati batas waktu permohonan sehingga tidak memiliki Persetujuan Menteri, atau akta perubahan anggaran dasar tidak dapat tidak berlaku karena tidak adanya persetujuan Menteri. Hal tersebut disebabkan 3 (tiga) hal, yang pertama, akta perubahan anggaran dasar merupakan wujud dari adanya perjanjian, sehingga perjanjian yang dibuat haruslah ditaati, karena perjanjian merupakan Undang-Undang bagi mereka yang telah membuat perjanjian, dan akta perubahan anggaran dasar adalah bukti tertulis yang dapat menunjukkan adanya perjanjian tersebut. Yang kedua, akta perubahan anggaran dasar yang tidak memenuhi keharusan seperti yang tersebut di dalam Pasal 21 UUPT, tidak menyebabkan akta perubahan tersebut menjadi batal, sehingga tidak ada syarat batal untuk tidak dipenuhinya keharusan untuk Mendapat Persetujuan Menteri, sehingga Akta Perubahan Anggaran Dasar yang Tidak Memiliki Persetujuan Menteri Hukum dan HAM, tidak batal dengan oleh sebab tidak dimilikinya Persetujuan Menteri Hukum dan HAM. Dan yang ketiga akta perubahan perseroan terbatas merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang penuh, serta menjamin adanya kepastian hukum, sehingga para pihak yang mengikatkan diri dalam akta autentik tidak dapat mengingkari perbuatan hukum yang telah dituangkan di dalam akta autentik. Sehingga Akta tersebut masih berlaku dan harus ditaati, karena perjanjian merupakan Undang-Undang bagi yang membuat perjanjian, dan akta autentik merupakan akta yang memiliki kekuatan pembuktian.
3. Upaya Hukum yang dapat ditempuh oleh Perseroan Terbatas, yakni ada 2 (dua) hal yang dapat di tempuh oleh perseroan terbatas, yang pertama, upaya hukum yang dilakukan di Internal perseroan terbatas, untuk membenahi sistem yang

menyebabkan bermasalahnya perseroan terbatas. Upaya yang dapat ditempuh di internal perseroan terbatas, yakni upaya yang dapat dilakukan oleh perseroan terbatas atau pemegang saham yang merasa dirugikan karena kelalaian yang dilakukan oleh direksi, selaku pengurus perseroan terbatas, dengan meminta pertanggungjawaban direksi, membentuk RUPS, memecat atau memberhentikan direksi yang memiliki itikad buruk, baik melalui RUPS, maupun secara langsung dengan surat pemecatan atau pemberhentian yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham, dan menuntut direksi secara perdata maupun pidana terhadap direksi yang beritikad buruk.

Upaya yang kedua, upaya hukum di notaris, yakni untuk mendapatkan legalitas yang diperlukan oleh perseroan terbatas, dapat di tempuh dua cara, yakni:,membatalkan akta yang tidak memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan HAM, hal ini ditempuh dikarenakan adanya pemegang saham yang merasa dirugikan, karena tindakan atau kelalaian direksi sebagai pengurus perseroan, yang telah merusak *Trust* (kepercayaan) serta memperlihatkan itikad buruk sebagai seorang pengurus perseroan terbatas, sehingga pemegang saham tersebut, keluar dari perseroan terbatas, dengan menjual saham kepemilikannya. Sehingga akta yang tidak memiliki Persetujuan Menteri tersebut wajib dibatalkan, dan dibuat akta yang baru, dengan perubahan posisi susunan pemegang saham. Setelah dibuat akta perubahan anggaran dasar yang baru, permohonan persetujuan Menteri dapat diajukan kembali, sesuai dengan mekanisme yang telah di tentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan maupun Peraturan Pelaksananya.

Cara yang kedua, dengan membuat akta pengukuhan atau akta penegasan terhadap akta yang tidak dimohonkan tersebut, hal ini dapat dilakukan apabila pemegang saham merasa tidak dirugikan karena kelalaian yang dilakukan oleh direksi, namun demikian juga, terhadap pembuatan akta pengukuhan atau akta penegasan ini juga harus menempuh mekanisme RUPS (rapat umum pemegang saham) ulang, dan kemudian akta pengukuhan atau akta penegasan dapat dibuat dan dimohonkan kembali.

B. Saran.

1. Untuk menguatkan Peraturan Perundang-Undangan, khususnya Pasal 21 tentang Perubahan anggaran dasar, seharusnya dicantumkan sanksi dibalik kata “Harus” yang disebut di dalam Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, sehingga dengan sanksi yang tegas, kata “Harus” tersebut menjadi bermakna.
2. Sebagai pengurus perseroan terbatas, direksi harus menjaga kepercayaan (*Trust*) yang telah diberikan, dengan menjunjung tinggi prinsip *duty of Care and loyalty* dan prinsip kehati-hatian, sehingga dengan prinsip itu, direksi akan selalu menciptakan suasana yang kondusif bagi perseroan terbatas.
3. Perseroan Terbatas merupakan badan hukum, di dalam badan hukum terdapat subjek-subjek hukum yang lain, yang memiliki hak dan kewajiban, oleh karena itu sebagai subjek hukum, haruslah mematuhi ketentuan hukum yang ada, sehingga dengan perbuatan tersebut tidak menimbulkan akibat hukum yang dapat merugikan bagi subjek hukum yang lain.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku.

- Fachruddin, Irfan, 1994, *Kedudukan Notaris Dan Akta-Aktanya Dalam Sengketa Tata Usaha Negara*, Varia Pengadilan, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 1996, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- , 2013, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kansil, CST, 1979, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kansil, CST, & Christine, 2005, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Khairandy, Ridwana, 2009, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*. Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- Lumban Tobing, GHS, 1996, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.
- Prasetya, Rudhi, 2005, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*. Jakarta: Pradnya Paramita, Jakarta.

- , 2014, *Perseroan Terbatas Teori Dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Prodjodikoro, W, 2000, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Subekti, R. & Tjitrosudibio, R, 1992, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Fradnya Paramita, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Gafindo Persada, Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2014, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1993, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- , 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Widiyono, Try, 2008, *Direksi Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Widjaya, Gunawan, 2003, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2007, *Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) Dalam Hukum Perdata*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- , 2008, *Hak Individu dan Kolektif Para Pemegang Saham*, Forum Sahabat, Jakarta.
- , 2008, *Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris, Dan Pemilik PT*, Forum Sahabat, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.

C. Sumber Lain (Internet)

<http://catatansurya09.blogspot.com/2013/11/kesadaran-hukum-ketaatan-hukum-dan.html>

<http://www.slideshare.net/amethyskebatalan-dan-degradasi-akta-notaris>
www.djpp.kemenkumham.go.id.